

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UMKM BERDASARKAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK
(Studi Kasus Pada CV Media Grafika)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
mencapai derajat sarjana S-1
Program Studi Akuntansi



Diajukan Oleh :

Sindi Pratiwi Kusumaningrum

2018222384

**KONSENTRASI AKUNTANSI KORPORASI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UMKM BERDASARKAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK
(Studi Kasus Pada CV Media Grafika)**

Diajukan Oleh :

Nama : Sindi Pratiwi Kusumaningrum

NIM : 2018 222 384

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji tugas akhir/skripsi STIE Nobel
Indonesia pada tanggal 28 Februari 2020 dan dinyatakan diterima untuk
memenuhi syarat guna memperoleh gelar akademik Sarjana Akuntansi – S.Ak

Makassar, 13 Oktober 2020

Tim Penguji

Ketua : Muh Saleh R. S.E., M.Si

Sekretaris : Asbi Amin, SE., M. Ak


Anggota : Drs. Syarifuddin Lantjo M.Si. Ak



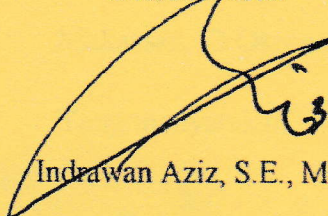
School Of Business

Mengesahkan

Wakil Ketua I
Bidang Akademik

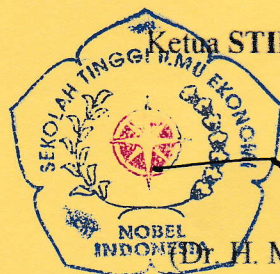

Dr. Ahmad Firman S.E., M.Si.

Ketua Jurusan


Indrawan Aziz, S.E., M.Si

Mengetahui

Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar




H. Mashur Razak, S.E., M.M)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sindi Pratiwi Kusumaningrum
NIM : 2018222384
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Korporasi
Judul : Analisis Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar
Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
(Studi kasus pada CV Media Grafika)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat adalah karya ilmiah saya sendiri. Kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan yang saya buat tidak benar.

Makassar, 13 Oktober 2020

Yang menyatakan,



Sindi Pratiwi Kusumaningrum
NIM : 2018222384

ABSTRAK

Sindi Pratiwi Kusumaningrum, 2020. Analisis Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada CV Media Grafika), pembimbing Muh Saleh R.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kesesuaian atau tidak kesesuaian laporan keuangan CV Media Grafika berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa komparatif deskriptif agar dapat menggambarkan dengan jelas tentang keadaan dan kejadian yang telah diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh CV Media Grafika nyaris sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang berlaku. Hal ini terjadi karena CV Media Grafika hanya membuat laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas dengan tidak mementingkan catatan atas laporan keuangan. Namun secara kebijakan akuntansi, CV Media Grafika telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Kata kunci : SAK ETAP, Laporan Keuangan, UMKM



ABSTRACT

Sindi Pratiwi Kusumaningrum. 2020. *Analysis of Micro Small And Medium Enterprises (MSME) Financial Statements Based In Entity Financial Accounting Standards Without Public Aaccountability (Case Study in CV Graphic Media), supervised by Muh Saleh R.*

This research aims to determine how to suitability of financial statement in CV Graphic Media basedin Entity FinancialAccounting standards without public accountability.

This research used a descriptive data analysis method to be able to clearly describe the circumstances and events that have been studied.

The result of this research indicate that the financial statements presented by CV Media Grafika are almost in suitable with the Entity Financial Accounting Standards Without Public Accountability in force. This Happened because CV Media Grafika only made a Profit and Loss Statement, Balance Sheet, Statement of Changes ub Equity, and Statement of Cash Flow with no regard to the Notes of the Financial Statements. But in accounting policy, CV Media Grafika has presented financial reports in accordance with applicable standards.

Keyword: *SAK ETAP, Financial Statements, SMEs*



MOTTO

“Tuhan tidak tidur. Tuhan menjagaku. Tuhan mendengarkan keluh kesahku. Tuhan diam-diam sedang berusaha mengabulkan doadoaku”

“Tanam benih yang baik untuk bisa mengunduh buah yang manis di kemudian hari.”

“Langkah pertama akan mengubah segalanya.”

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat selesai dan atas dukungan doa dari orang-orang tercinta akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur tanpa henti, skripsi ini kupersembahkan untuk :

Kedua Orang Tuaku tercinta :

Sutiyo Raharjo

Supartini

Adikku

Fadilah Yulianto

Seluruh keluarga besar

Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus.

**Serta, Almameter yang kubanggakan
STIE NOBEL INDONESIA MAKASSAR**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala Puji bagi Allah, Sang Maha Pencipta dan Pengatur Alam Semesta, Berkat Ridho-Nya penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada CV Media Grafika)”**

Dalam menyusun proposal ini, banyak kesulitan dan hambatan yang penulis alami, namun berkat dukungan, dorongan, dan semangat dari orang terdekat, sehingga penulis mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Mashur Razak, SE., M.M., selaku ketua STIE Nobel Indonesia Makassar
2. Bapak Indrawan SE. M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi STIE Nobel Indonesia Makassar.
3. Bapak Muh. Saleh R. S.E, M.Si selaku pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan saya terkait hal penulisan.
4. Ibu Asbi Amin, SE, M.Ak, dan Bapak Drs. Syarifuddin Lantjo M.Si. Ak., selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi terciptanya sebuah skripsi yang baik.
5. Bapak/Ibu dosen yang telah begitu berbelas asih untuk membekali penulis dengan ilmu dan pelajaran yang sangat berharga selama proses perkuliahan..

6. Bapak dan Ibu tercinta yang tak henti memberikan dukungan, motivasi dan semangat.
7. Bapak Bambang Sihwanto selaku pemilik objek penelitian yang telah bersedia memberikan lokasi penelitian bagi peneliti.
8. Kak Abdul Gafur selaku pihak akuntansi yang telah menyediakan data-data yang peneliti butuhkan.
9. Teman senasib dan sepenanggungan Wahyuni Wulandari yang telah berjuang bersama hingga titik terakhir,
10. *My Girl Spirit*, yang sudah menemani belajar di kampus nyaris selama empat tahun.
11. Teman-teman transfer (Astrid, Angri, Riri, Nengsi, Kak Dian, Marjan, dan Anggi) yang selalu kompak.
12. Juga kepada Atira Puspawati, Nur Mashita, Eni Mulyani, yang telah begitu ramah dan banyak membantu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. oleh karena itu segala kritikan dan saran yang membangun akan penulis terima dengan baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 13Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5.Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia	9
2.1.1 PSAK-IFRS	9
2.1.2 SAK ETAP	10
2.1.3 Perbedaan PSAK-IFRS dan SAK ETAP	11

2.2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP'	20
2.2.1 Definisi Laporan Keuangan.....	20
2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan	21
2.2.3 Karakteristik Kualitatif Informasi Laporan Keuangan.....	21
2.2.4 Elemen-Elemen Laporan Keuangan.....	24
2.2.5 Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan	37
2.2.6 Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan	39
2.2.7 Penyajian Laporan Keuangan.....	39
2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	41
2.3.1 Pengertian UMKM.....	41
2.3.2 Kriteria UMKM.....	42
2.4 Penelitian Terdahulu	44
2.5 Kerangka Pikir.....	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
3.2 Jenis dan Sumber Data	47
3.3 Metode Pengumpulan Data	48
3.4 Metode Analisis Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Profil Perusahaan	52
4.1.1 Profil CV Media Grafika.....	52
4.1.2 Visi dan Misi	53
4.1.3 Struktur Organisasi.....	54
4.1.4 Alur transaksi	56
4.2 Analisis kesesuaian laporan keuangan dengan SAK ETAP.....	61
4.2.1 Analisis kesesuaian laporan keuangan	61
4.2.2 Analisis kebijakan keuangan	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77

5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir	46
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Perbedaan PSAK-IFRS dan SAK ETAP	12
Tabel 2.2 : Kriteria UMKM	43
Tabel 2.3 : Daftar Penelitian Terdahulu.....	44
Tabel 4.1 : Analisis pengakuan, pengukuran, penyajian laporan keuangan.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Neraca	i
Laporan laba rugi	ii
Laporan perubahan ekuitas	iii
Daftar pertanyaan	vi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebuah kegiatan ekonomi yang kompleks selalu dimulai dari interaksi rumah tangga yang sederhana. Kebutuhan sehari-hari yang tak pernah berkurang jumlahnya serta tidak dapat ditunda-tunda pemenuhannya, membuat roda perekonomian berputar makin laju. Tingkat konsumtif masyarakat terus meningkat seiring dengan membaiknya pendapatan yang mereka miliki. Menimbulkan peluang-peluang ekonomi yang dapat terbaca lantas dimanfaatkan oleh beberapa kalangan yang memiliki kemampuan dan niat untuk menciptakan sebuah usaha demi menyejahterakan diri sendiri dan keluarga. Semula usaha tersebut dilakukan secara swadaya. Dengan modal terbatas, dengan manajemen pengaturan ala kadarnya. Tapi kegigihan pun bisa saja memecah batu besar jadi beberapa kerikil kecil. Begitu pun dengan merintis sebuah usaha, berapa pun modalnya asal memiliki ketekunan dan alur pengelolaan yang baik niscaya usaha itu akan berkembang dan menjadi besar.

Peluang ini lah yang kemudian menjadi cikal bakal merebaknya usaha-usaha baru yang dimiliki masyarakat dengan modal relatif kecil sekaligus dikelola secara mandiri oleh pribadi masing-masing. Kini usaha-usaha dengan beraneka ragam pasar itu akrab disebut dengan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).

Namun, jangan tertipu oleh keterbatasan modal yang terkandung dalam nama UMKM ini. Karena yang terjadi adalah UMKM memiliki peran sangat besar

untuk sejarah perekonomian Indonesia. Semua itu tergambar pada krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia bertahun-tahun lalu dan membawa akibat yang cukup parah bagi perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar yang selama ini menguasai asset dan perekonomian nasional. Dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya. Sedang sektor usaha kecil menengah ternyata mempunyai daya tahan yang tinggi sehingga mampu bertahan dari badai krisis ekonomi dan moneter. (Kristiyanti, 2012)

Hanya saja bukan perkara mudah untuk membesarkan sebuah UMKM. Bermodal modal seadanya, tekun, inovatif, dan pantang menyerah saja sudah barang tentu tak akan cukup untuk bersaing di tengah desakan pasar yang membeludak. Sebagai usaha mandiri yang dikelola secara pribadi pasti akan didapati beberapa hambatan yang bisa menjegal usaha rintisan ini. Membuatnya stagnan dan pada akhirnya gagal bertahan.

Salah satu alasan mengapa UMKM rentan gagal adalah kurangnya pencatatan keuangan dari kegiatan operasional usaha yang dilakukan serta kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya UMKM menyusun laporan keuangan. Dikatakan oleh Sejawali (2017) pelaku usaha cenderung menghindari laporan keuangan yang dinilai rumit dan belum sebanding dengan kegunaannya, akibatnya UMKM kesulitan dalam mengukur dan mengevaluasi kinerjanya, serta mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha. Semakin luasnya ukuran usaha, maka pelaku usaha menjadi semakin tidak mampu untuk memantau secara langsung kegiatan usaha yang sedang berjalan. Sehingga perusahaan sangat rentan

mengalami kecurangan-kecurangan ataupun kesalahan dalam penetapan kebijakan maupun pengambilan keputusan.

Maka dari itu, keberadaan laporan keuangan adalah sangat penting. Laporan keuangan adalah tolok ukur dalam menilai kesehatan perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia (2009:2) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Melihat pentingnya laporan keuangan dalam menilai kesehatan perusahaan, maka laporan keuangan harus disusun secara cermat dan terbebas dari bias. Laporan keuangan harus dapat diinterpretasikan oleh para pihak yang memiliki kepentingan (*interested party*) dengan persepsi yang sama. Untuk itu perlu adanya suatu standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. (Pratiwi, dkk. 2014)

Namun dalam praktiknya, masih banyak UMKM yang tidak menyediakan atau menyusun laporan keuangan dalam usahanya (Tuti dan Patricia. 2015). Pernyataan ini kemudian didukung oleh pernyataan Pradipta pada penelitian yang dilakukan oleh Nurdwijayanti dan Sulistianingsih (2018) tentang rendahnya penyusunan laporan keuangan disebabkan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM.

Maka dari itu, pemerintah Indonesia kemudian mengatur secara khusus kewajiban UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Peraturan tersebut

dituangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK ETAP) yang sudah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada 19 Mei 2009. Standar ini dikemas cukup ringkas jika dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Walaupun cukup ringkas, tidak banyak merubah prinsip-prinsip yang umumnya telah dilaksanakan saat ini. Kehadiran standar ini dapat menjadi acuan yang lebih mudah bagi kalangan yang lebih luas untuk penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima secara umum. (Sariningtyas dan Diah, 2012)

Bertahun-tahun diterapkan, rupanya pencatatan keuangan yang dilakukan UMKM di Indonesia masih jauh dari SAK ETAP. Banyak pelaku UMKM yang belum siap untuk menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku ini. Sebagai contoh adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmawati, T dan Pustitasari, O.R (2016) pada UMKM di Kabupaten Kuningan, yang menyebutkan sebanyak 57% UMKM tidak paham SAK ETAP, 38% UMKM sangat tidak paham SAK ETAP, dan hanya 5% yang sudah paham. Sejalan dengan rendahnya pemahaman akan SAK ETAP, Tiswiyanti, desriyanto, dan Fitriani Mansur (2017) melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan UMKM di Kota Jambi Seberang kurang baik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya 13,045% laporan keuangan yang telah baik. 13,045% membuat laporan yang kurang baik, serta 73,91% responden tidak membuat laporan keuangan.

Secara garis besar banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan SAK ETAP. Frisilia dan I Gede (2018) telah merangkum pernyataan Darmayanti, dkk. (2017) yang menyatakan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh UMKM

Pengrajin Endek Mastuli “Ayu Lestari” di Kecamatan Buleleng masih belum sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dimana UMKM tersebut hanya menyusun laporan pembayaran piutang saja. Ketidakmampuan pemilik dalam melakukan pencatatan yang benar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pemilik terhadap bagaimana laporan keuangan yang sesuai dengan usaha pemilik. Salmiah, dkk., (2015) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa bentuk penerapan akuntansi pada UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru rata-rata belum sesuai dengan SAK ETAP.

Dalam lingkungan yang lebih dekat, Misnawati Raouf (2018) telah melakukan penelitian pada dua belas UMKM sutera di Sengkang. Dan hasil dari penelitian tersebut adalah hanya satu UMKM yang telah menerapkan SAK ETAP dan sebelas UMKM pengrajin sutera lainnya tidak menerapkan SAK ETAP. Menyempit di Kota Makassar, Ramdani, Masruhi, dan As’ad juga telah melakukan penelitian pada beberapa UMKM berupa warkop di kota ini, dengan hasil bahwa pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan Pengelola UMKM Warkop hanya sebatas laporan bisnis yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing-masing Pengelola UMKM Warkop. Beberapa penelitian di atas menunjukkan fenomena tentang masih rendahnya kemampuan dan kesiapan UMKM dalam membuat laporan keuangan yang telah berdasarkan SAK ETAP.

CV Media Grafika sendiri telah berdiri sejak tahun 2011. CV Media Grafika termasuk dalam golongan usaha menengah dengan rata-rata pendapatan per tahun

adalah Rp4.800.000.000 dan merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. CV Media Grafika bergerak dalam bidang usaha penjualan mesin fotocopy dengan pasar yang mencakup area Indonesia tengah dan Timur. Saat ini, Media Grafika telah memiliki empat cabang yang berlokasi di daerah Mamuju, Kendari, dan Toraja.

Berdasarkan observasi awal, didapatkan informasi bahwa CV Media Gradika telah mencatat transaksi keuangan usaha mereka dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang pada umumnya mereka pergunakan sebagai sarana evaluasi bagi pemilik usaha, dasar penentuan pajak, juga akses perbankan.

Dari seluruh kejadian di atas penulis tertarik untuk mengkaji kembali laporan keuangan yang telah dirancang oleh CV Media Grafika dengan judul penelitian **“Analisis Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Studi Kasus pada CV Media Grafika).”**

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Laporan Keuangan CV Media Grafika Telah Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Kesesuaian Atau Tidak Kesesuaian Laporan Keuangan CV

Media Grafika Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan menghasilkan manfaat dan kegunaan, untuk berbagai pihak. Terkhusus untuk :

1. Bagi Penulis

Sebagai sumber ilmu dan pemahaman tentang implementasi laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yang terjadi di masyarakat pada umumnya.

2. Bagi UMKM

Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi UMKM agar dapat menyajikan sebuah laporan keuangan yang telah berstandarkan SAK ETAP.

3. Bagi Akademis

Sebagai bahan referensi dan informasi dalam hal penerapan dan penyusunan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik bagi pihak-pihak lain.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan proposal ini mengacu pada Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi yang telah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia, yang meliputi :

BAB I : Pendahuluan

Bab Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Landasan teortis dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal/artikel, maupun skripsi yang berhubungan dengan penelitian

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini mencakup objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membuat gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu dan tidak terpecah menjadi sub judul tersendiri. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel, gambar, atau bentuk lainnya, dan ditempatkan dengan pembahasan supaya pembaca dapat memahami uraian penulis.

BAB V : Penutup

Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran-saraa dan dapat dipecah menjadi sub judul tersendiri, yaitu Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah metode atau format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan bisnis. Di Indonesia, SAK dikembangkan menjadi empat cabang yang disusun untuk memenuhi setiap kebutuhan instansi yang berbeda-beda. Empat SAK tersebut adalah:

1. PSAK IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – IFRS)
2. Standar Akuntansi Keuangan Syariah
3. Standar Akuntansi Publik
4. Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik

SAK di Indonesia disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). IAI adalah organisasi profesi yang mewadahi para akuntan di Indonesia dan memiliki peran dalam penyusunan SAK. (Hetika dan Nurul, 2017)

2.1.1 PSAK IFRS

Dikutip dari laman resmi Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Efektif 1 Januari 2015 yang berlaku di Indonesia secara garis besar akan konvergen dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 Januari 2012 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015. Ini merupakan suatu bentuk komitmen Indonesia melalui DSAK IAI dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sendiri terdiri atas 73 bab yang berisi tentang pengaturan yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan entitas.

Entitas yang menerapkan PSAK-IFRS biasanya adalah entitas yang memiliki akuntabilitas publik. Artinya entitas tersebut termasuk dalam badan usaha yang telah terdaftar atau sedang dalam proses mendaftar di pasar modal sebagai emiten.

2.1.2 SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas diperuntukkan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Entitas yang akuntabilitasnya tidak signifikan, artinya entitas tersebut tidak terdaftar dan tidak berada dalam tahap mendaftarkan diri di pasar modal sebagai emiten. SAK ETAP sendiri merupakan hasil penyederhanaan dari Standar Akuntansi IFRS yang jauh lebih kompleks.

SAK ETAP sendiri diterbitkan tahun 2009 berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu 1 Januari 2010. SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SAK ETAP terdiri dari 30 bab dengan jumlah halaman sebanyak 182 halaman. (Rosmiati dkk, 2018)

2.1.3 Perbedaan PSAK-IFRS dan SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dibuat untuk memudahkan UMKM agar dapat menyusun laporan keuangannya sendiri, di mana laporan tersebut dapat diaudit dan mendapat opini atas audit yang dilakukan. Hal itu diberlakukan sebab, implementasi standar PSAK-IFRS dalam penyusunan laporan keuangan UMKM dirasa sangat berat dilaksanakan. (Rahmawati dan Oktaviani, 2017). SAK ETAP dikatakan sebagai bentuk sederhana dari PSAK-IFRS yang kompleks. Hal itu tercermin dari perbedaan mendasar yang terdapat di SAK ETAP dibandingkan dengan yang terkandung pada PSAK . Perbedaan tersebut antara lain :

1. Tidak mengatur pajak tangguhan
2. Hanya menggunakan metode tidak langsung untuk laporan arus kas.
3. Menggunakan cost model untuk investasi ke asosiasi dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan.
4. Tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/55.
5. Hanya menggunakan model cost untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti investasi, sedangkan PSAK-IFRS boleh memilih *cost model* atau model revaluasi.

Berikut ini adalah table perbandingan PSAK dengan SAK-ETAP yang dapat membantu anda untuk memahami perbedaan keduanya :

Tabel 2.1

Perbedaan PSAK IFRS dan SAK ETAP

No	Elemen	PSAK-IFRS	SAK ETAP
1	Penyajian Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan posisi keuangan • Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan • Perbedaan aset lancar dan tidak lancar dan laibilitas jangka pendek dan jangka panjang • Aset lancar • Laibilitas jangka pendek • Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan <p>(Perubahan istilah di ED PSAK 1: Neraca menjadi Laporan Posisi Keuangan, Kewajiban (liability) menjadi laibilitas</p>	<p>Sama dengan PSAK, kecuali informasi yang disajikan dalam neraca, yang menghilangkan pos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aset keuangan • Properti investasi yang diukur pada nilai wajar (ED PSAK 1) • Aset biologik yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar (ED PSAK 1) • Kewajiban berbunga jangka panjang • Aset dan kewajiban pajak tangguhan <p>Kepentingan nonpengendalian</p>
2	Laporan Laba Rugi	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan laba rugi komprehensif ○ Informasi yang disajikan dalam laporan Laba Rugi Komprehensif ○ Laba rugi selama periode <ul style="list-style-type: none"> ○ Pendapatan komprehensif lain selama periode ○ Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan 	<p>Tidak sama dengan PSAK yang menggunakan istilah laporan laba rugi komprehensif, SAK ETAP menggunakan istilah laporan laba rugi.</p>

		atas laporan keuangan	
3	Penyajian Perubahan Ekuitas		Sama dengan PSAK, kecuali untuk beberapa hal yang terkait pendapatan komprehensif lain.
4	Catatan Atas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan atas laporan keuangan • Struktur • Pengungkapan kebijakan Akuntansi • Sumber estimasi ketidakpastian • Modal (ED PSAK 1) • Pengungkapan lain 	Sama dengan PSAK, kecuali pengungkapan modal.
5	Laporan Arus Kas	<ul style="list-style-type: none"> • Arus kas aktivitas operasi: metode langsung dan tidak langsung • Arus kas aktivitas investasi • Arus kas aktivitas pendanaan • Arus kas mata uang asing • Arus kas bunga dan dividen, pajak penghasilan, transaksi non-kas 	<p>Sama dengan PSAK kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arus kas aktivitas operasi: metode tidak langsung • Arus kas mata uang asing, tidak diatur.
6	Laporan keuangan konsolidasi dan terpisah	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan penyajian lapkeu konsolidasi • Entitas bertujuan khusus • Prosedur konsolidasi • Lapkeu tersendiri • Lapkeu gabungan 	Tidak diatur (Lihat Bab 12).
7	Kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan	<p>PSAK 25 (Laba atau Rugi Bersih untuk periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laba atau rugi bersih untuk Periode berjalan • Kesalahan Mendasar • Perubahan kebijakan Akuntansi • Pemilihan dan penerapan 	SAK ETAP sudah maju satu langkah dibandingkan PSAK (tidak ada “kesalahan mendasar” dan “laba atau rugi luar biasa”).

		kebijakan akuntansi <ul style="list-style-type: none"> • Konsistensi dan perubahan kebijakan akuntansi • Perubahan Estimasi akuntansi • Kesalahan. • Pos luar biasa • Laba atau rugi dari aktivitas normal • Operasi yang tidak dilanjutkan • Perubahan estimasi Akuntansi • Penerapan suatu standar Akuntansi keuangan • Perubahan kebijakan Akuntansi yang lain 	
8		<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup: aset dan kewajiban keuangan • Instrumen keuangan dasar: • Diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, pinjaman dan pinjaman yang diberikan • Impairment menggunakan incurred loss concept • Derecognition • Hedging dan derivatif • Ruang lingkup: investasi pada efek tertentu • Klasifikasi trading, held to maturity, dan available for sale. Hal tsb mengacu ke 	PSAK 50 (1998).
9	Persediaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran persediaan • Biaya persediaan • Biaya pembelian • Biaya konversi • Biaya lain-lain • Biaya persediaan pemberian jasa • Teknik pengukuran biaya • Rumus biaya 	Sama dengan PSAK

		<ul style="list-style-type: none"> • Nilai realisasi bersih • Pengakuan sebagai beban • Pengungkapan 	
10	Investasi pada perusahaan asosiasi dan entitas anak	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup: entitas asosiasi • Metode akuntansi • Metode biaya • Metode ekuitas • Model nilai wajar (ED PSAK 15) • Ruang lingkup: entitas asosiasi dan entitas anak • Metode akuntansi • Entitas asosiasi : metode biaya • Entitas anak : 	metode ekuitas
11	Investasi pada perusahaan asosiasi dan entitas anak	<ul style="list-style-type: none"> • Jointly controlled operation, asset, and entity • Metode akuntansi • Metode konsolidasi proporsional • Metode ekuitas • Model nilai wajar (ED PSAK 12 : PBA/PBO/PBE) 	Sama dengan PSAK kecuali metode akuntansi hanya menggunakan metode biaya.
12	Property Investasi	<p>Metode akuntansi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model nilai wajar <p>Model biaya</p>	Metode akuntansi: model biaya
13	Aset Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan kompenenisasi • Pengukuran menggunakan model biaya atau model revaluasi • Pengukuran biaya perolehan • Pengakuan pengeluaran selanjutnya • Penyusutan • Tidak perlu review nilai residu, metode penyusutan, dan umur manfaat setiap akhir 	<p>Sama dengan PSAK kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak menggunakan pendekatan kompenenisasi. • Revaluasi diijinkan jika dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Hal ini mengacu ke PSAK

		periode pelaporan, tetapi jika ada indikasi perubahan saja	16 (1994) <ul style="list-style-type: none"> • Tidak perlu review nilai residu.
14	Asset Tidak Berwujud	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip umum untuk pengakuan • Pengakuan awal, pengukuran selanjutnya • Amortisasi selama umur manfaat atau 10 tahun <p>Penurunan nilai</p>	Sama dengan PSAK, kecuali aset tidak berwujud yang diperoleh dari penggabungan usaha.
		<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode pembelian • Goodwill dimaortisasi 5 tahun atau 20 tahun dengan justifikasi manajemen 	Tidak diatur
15	Sewa	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur perjanjian yang mengandung sewa • Klasifikasi bersifat principle based • Laporan keuangan lessee dan • Tidak mengatur perjanjian yang mengandung sewa (ISAK 8) 	
		Lessor	<ul style="list-style-type: none"> • Klasifikasi sewa: kombinasi IFRS for SMEs dan SFAS 13 • Laporan keuangan lessee dan lessor menggunakan PSAK 30 (1990): Akuntansi Sewa Guna Usaha
		<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban diestimasi • Kewajiban kontinjensi • Aset kontinjensi 	Sama dengan PSAK
16	Ekuitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan 	Sama dengan

		<ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan PT • Akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT • Reorganisasi • Selisih penilaian kembali 	PSAK, kecuali : <ul style="list-style-type: none"> • Reorganisasi • Selisih penilaian kembali
17	Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penjualan barang • Penjualan jasa • Kontrak konstruksi • Bunga, dividen dan royalti • Lampiran kasus pengakuan pendapatan (ED PSAK 23) 	Sama dengan PSAK.
18	Biaya Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> • Komponen biaya pinjaman • Pengakuan dan kapitalisasi biaya pinjaman 	Biaya pinjaman langsung dibebankan
19	Penurunan Nilai Aset	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan nilai persediaan • Penurunan nilai non-persediaan • Penurunan nilai goodwill 	Sama dengan PSAK, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup yang meliputi semua jenis aset. • Tidak mengatur penurunan nilai goodwill • Ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang menggunakan PSAK 31: Akuntansi Perbankan paragraf 16 dan 17.
20	Imbalan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Imbalan kerja jangka pendek • Imbalan pasca kerja, untuk manfaat pasti menggunakan PUC • Imbalan jangka panjang 	Sama dengan PSAK, kecuali untuk manfaat pasti menggunakan PUC dan jika tidak bisa, menggunakan metode yang disederhanakan

		lainnya Pesangon pemutusan kerja	
21	Pajak Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan deferred tax concept • Pengakuan dan pengukuran pajakkini • Pengakuan dan pengukuran pajaktangguhan • Menggunakan tax payable concept • Tidak ada pengakuan dan pengukuran pajaktangguhan 	
22	Mata Uang Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Mata uang pencatatan dan pelaporan • Mata uang fungsional • Penentuan saldo awal • Penyajian komparatif • Perubahan mata uang pencatatan dan pelaporan 	<p>Sama dengan PSAK Mata Uang Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mata uang fungsional • Pelaporan transaksi mata uang asing dalam mata uang fungsional • Perubahan mata uang fungsional (Pada prinsipnya sama)
23	Peristiwa setelah akhir periode pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Peristiwa yang memerlukan penyesuaian • Peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian 	Sama dengan PSAK
24	Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa • Pengungkapan 	Sama dengan PSAK 7
25	Aktivitas Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi perkoperasian • Akuntansi minyak dan gas bumi • Akuntansi pertambangan umum 	Tidak diatur

		<ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi perusahaan efek • Akuntansi reksa dana • Akuntansi perbankan dan asuransi 	
26	Ketentuan Transisi		<ul style="list-style-type: none"> • Retrospektif atau prospektif (jika tidak praktis) yang diterapkan secara prospective catchup (dampak ke saldo laba) • Perpindahan dari dan ke SAK ETAP
27	Tanggal Efektif		Berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011, penerapan dini 1 Januari 2010

Sumber : <http://layarasdos.blogspot.com/2014/05/perbedaan-sak-etap-dengan-psak.html>

2.2 Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Oleh Ikatan Akuntan Indonesia definisi dari laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan Keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

Kemudian Baridwan (2014) mengartikan Laporan keuangan sebagai ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Sedang oleh Hantono dan Namira (2018; 20), laporan keuangan merupakan catatan tentang informasi keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu yang menggambarkan kondisi atau kinerja perusahaan tersebut atau dengan kata lain laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan dan perhitungan yang berisi ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan selama periode tertentu. Lebih lanjut, laporan keuangan sebuah perusahaan akan menggambarkan kinerja perusahaan tersebut dalam menghasilkan keuntungan. Jika laporan keuangan perusahaan menunjukkan indikasi-indikasi yang positif maka kemungkinan besar para pihak yang terkait dengan perusahaan akan lebih percaya kepada perusahaan sehingga berbagai kerja sama terkait perusahaan dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan dari Laporan keuangan menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2007) adalah :

“Tujuan Laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.”

Lebih spesifik, menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 2 paragraf 1 dalam penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2011) menyebutkan tujuan dari laporan keuangan adalah :

“Untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapa pun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.”

2.2.3 Karakteristik Kualitatif Informasi Pada Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif yang membuat laporan keuangan digunakan oleh pemakai atau pengguna informasi keuangan dalam SAK ETAP, Bab 2 Paragraf 2.7 sampai dengan 2.11. (Qoni'ah, 2018)

1. Dapat Dipahami

Informasi laporan keuangan agar dapat digunakan dan bermanfaat, haruslah berkualitas dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan. Selain itu

manajemen harus memberikan informasi yang relevan agar memudahkan untuk membuat pertimbangan yang tepat.

2. Relevan

Informasi laporan keuangan di katakan relevan apabila informasi tersebut dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan bermanfaat untuk pengevaluasian peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan. Sehingga informasi keuangan tersebut dapat mempengaruhi atau mengubah keputusan yang akan diambil.

3. Materilitas

Laporan keuangan di anggap material apabila dalam mencantumkan informasi terkait pos-pos yang disajikan atau tingkat salahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi terhadap keputusan yang diambil.

4. Keandalan

Informasi yang disajikan haruslah andal (reliabel) karena menyebabkan informasi tersebut berkualitas bagi pengguna laporan keuangan, selain itu dalam laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi tersebut dapat diuji kebenarannya (verifiabel), netral, menggambarkan keadaan secara wajar sesuai peristiwa yang digambarkan, selain itu bebas dari unsur bias dan material.

5. Substansi Mengungguli Bentuk

Informasi dalam laporan keuangan disajikan sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, dicatat dan disajikan sesuai dengan realitas ekonomi, sehingga dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan.

6. Pertimbangan Sehat

Informasi yang disajikan perlu memperhatikan peristiwa yang terjadi dan harus mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.

7. Kelengkapan

Informasi keuangan agar dapat digunakan haruslah lengkap, Maka dari itu laporan keuangan yang disajikan harus lengkap dan mengungkapkan bukti-bukti yang jelas.

8. Dapat Dibandingkan

Pihak-pihak yang berkepentingan harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas guna mengetahui kinerja keuangan serta mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Maka dari itu penyajian laporan keuangan harus dilakukan secara konsisten. selain itu para pengguna harus mendapatkan informasi terkait kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

9. Tepat Waktu

Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. salah satunya adalah tepat waktu, maka dari itu jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

10. Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi keuangan seharusnya melebihi biaya penyediaan, antara biaya dan manfaat merupakan suatu pertimbangan yang penting. Biaya juga tidak harus ditanggung oleh para pengguna laporan keuangan, sedangkan manfaat juga harus diperhatikan karena dapat digunakan oleh pengguna eksternal.

2.2.4 Elemen-elemen Laporan Keuangan

Qoni'ah telah mengutip SAK ETAP pada Bab 3, paragraf 12 yang menyebutkan bahwa komponen laporan keuangan entitas meliputi:

1. Neraca

Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu, yakni pada akhir periode pelaporan (SAK ETAP, Bab 4, paragraf 1).

Neraca minimal mencakup pos-pos berikut:

- a. kas dan setara kas,
- b. piutang usaha dan piutang lainnya,
- c. persediaan,
- d. properti investasi
- e. aset tetap,
- f. aset tidak berwujud,
- g. utang usaha dan utang lainnya,
- h. aset dan kewajiban pajak,
- i. kewajiban diestimasi,
- j. ekuitas

Pada bab 4 paragraf 10, dijelaskan bahwa SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang berbeda baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca.

2. Laporan Laba Rugi

Pada bab 5 paragraf 2, Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas pada suatu periode yang digunakan untuk menunjukkan kinerja keuangan selama periode tersebut. Laporan labarugi mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Beban keuangan
- c. Bagian laba atau rugi investasi (metode ekuitas)
- d. Beban pajak
- e. Laba atau rugi bersih

3. Penyajian perubahan ekuitas

Pada Bab 6 paragraf 2 dijelaskan bahwa

- a. Perubahan ekuitas selama suatu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.
- b. Selain perubahan ekuitas yang terjadi akibat dari kegiatan transaksi perubahan yang termasuk jumlah investasi, pembayar dividendan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut.

Informasi yang disajikan di laporan perubahan ekuitas meliputi:

- a. Laba atau rugi untuk periode

- b. Pendapatan atau beban yang diakui langsung dalam ekuitas
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai dengan bab 9 tentang Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan
- d. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode diungkapkan secara terpisah

4. Laporan Arus kas

Pada bab 7 paragraf 1 dijelaskan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab 8 paragraf 1 tentang Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. (SAK ETAP nomor 8 paragraf 2) :

- a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu.
- b. Mengungkapkan informasi yang diisyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.
- c. Membertikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

6. Kebijakan Estimasi akuntansi dan kesalahan

Pada bab 9 paragraf 2 menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya.

- a. Dalam SAK ETAP bab 2.33 entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas dengan menggunakan dasar akrual. Penggunaan periodik, prepetual tidak di atur dalam SAK ETAP
- b. Dalam Paragraf 11.15 entitas harus menentukan biaya persediaan selain yang berkaitan dengan paragraf 11.14 dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP)/rata-rata tertimbang
- c. Metode penyusunan yang digunakan SAK ETAP diatur dalam paragraf 15.22 yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit produksi.

7. Investasi Pada Efek Tertentu

Mengatur penerapan akuntansi nilai wajar untuk efek utang dan efek ekuitas baik yang dimaksudkan oleh pemiliknya untuk diperdagangkan, efek yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh waktu ataupun tdk untuk keduanya. Efek adalah surat berharga utang atau ekuitas. Pada saat harga perolehan, entitas harus mengklasifikasi pada saat perolehan berdasarkan tujuan manajemen (SAK ETAP, bab 10 paragraf 2) :

- a. Dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*)
- b. Diperdagangkan (*trading*)
- c. Tersedia untuk dijual (*available for sale*)

8. Persediaan

Pada bab 11 paragraf 1 & 2 : Persediaan adalah aset :

- a. Untuk dijual dalam kegiatan usaha normal
- b. Dalam proses produksi untuk kemudian dijual
- c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa Kecuali :
 1. Persediaan dalam proses dalam kontrak kontruksi termasuk kontrakan jasa yang terkait secara langsung (pada bab 20 pendapatan)
 2. Efek tertentu (pada bab 10 investasi pada efek tertentu)

Entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang.

9. Investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak

Pada bab 12 paragraf 3:

- a. Entitas asosiasi: suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, dimana investor mempunyai pengaruh signifikan (Biasanya 20% hak suara atau lebih.) dan bukan entitas anak/bagian dalam joint venture. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode biaya (*cost method*).
- b. Entitas anak: entitas yang dikendalikan oleh induk. Investasi pada anak dengan metode ekuitas, dan tidak dibuat laporan konsolidasian.

10. Investasi pada *join-venture*

Pada bab 13 paragraf 2 menjelaskan tentang, *Joint venture*: perjanjian kontraktual antara beberapa pihak untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang menjadi pengendalian bersama. Joint venture dapat berbentuk :

- a. PBO (Pengendalian Bersama Operasi)
- b. PBA (Pengendalian Bersama Aset)
- c. PBE (Pengendalian Bersama Entitas)

11. Properti investasi

Pada bab 14 paragraf 2 menjelaskan tentang properti Investasi adalah tanah dan atau bangunan yang dikuasai (pemilik atau *lessee* melalui sewa pembiayaan) yang disewakan atau untuk kenaikan nilai dan bukan untuk digunakan untuk :

- a. Proses produksi atau penyediaan jasa atau tujuan administrasi
- b. Dijual dalam kegiatan sehari-hari. Pada saat pengakuan awal, properti investasi diukur pada biaya perolehannya. Setelah perolehan awal maka properti investasi dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai (*cost model*).

12. Aset tetap

Pada bab 15 paragraf 2 menjelaskan tentang Aset tetap:

- a. Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif dan
- b. Diharapkan digunakan lebih dari satu periode.

Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan, biaya perolehan aset tetap meliputi: (SAK ETAP bab 15 paragraf 6). Biaya perolehan aset tetap meliputi :

1. Harga beli
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tetap dan
3. Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan dan biaya restorasi lokasi.

Pada bab 15 paragraf 17, beban penyusutan harus diakui dalam laporan laba rugi, kecuali bab lain mensyaratkan biaya tersebut merupakan bagian biaya perolehan suatu aset. Misalnya, penyusutan aset tetap manufaktur termasuk biaya persediaan.

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana maksud manajemen. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh.

Suatu entitas harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Beberapa metode penyusutan yang mungkin dipilih antara lain : metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit produksi.

13. Aset tidak berwujud

Pada bab 16 paragraf 2 menjelaskan tentang Aset tidak berwujud: aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Syarat identifikasi:

- a. Dapat dipisahkan dari aset lainnya terbagi, atau terpisah atau dapat dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan baik individual atau bersama.
- b. Muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya.

14. Sewa

Pada bab 17 paragraf 2 menjelaskan tentang klasifikasi sewa tergantung pada substansi transaksi dan bukan bentuk hukumnya. Sewa dikalsifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan resiko kepemilikan aset. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan resiko kepemilikan aset.

15. Kewajiban diestimasi

Pada bab 18 paragraf 4 menjelaskan tentang kewajiban yang waktu atau jumlahnya belum pasti, entitas mengakui kewajiban diestimasi jika :

- a. Terdapat kewajiban kini sebagai hasil dari peristiwa masa lalu
- b. Kemungkinan (lebih mungkin dibandingkan tidak mungkin) terjadi arus keluar manfaat ekonomis pada saat penyelesaian.

- c. Jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal jumlah kewajiban diestimasi ditelaah setiap tanggal pelaporan dan melakukan penyesuaian untuk mencerminkan estimasi terbaik.

16. Ekuitas

Pada bab 19 paragraf 2 menjelaskan tentang ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang dan akta pendirian yang berlaku. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi yang relevan.(SAK ETAP, bab 19 paragraf 7). Modal saham meliputi: saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor.(SAK ETAP bab 19 paragraf 8)

17. Pendapatan

Bab 20 paragraf 1 menjelaskan, Pendapatan terjadi akibat dari:

- a. Penjualan barang
- b. Penyediaan jasa
- c. Kontrak konstruksi
- d. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain: (bunga, royalti atau dividen)

Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.

18. Biaya pinjaman

Bab 21 paragraf 1 menjelaskan tentang biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang timbul dari kewajiban keuangan suatu entitas,

- a. Bunga cerukan bank dan pinjaman jangka pendek dan panjang
- b. Amortisasi diskonto atau premium pinjaman
- c. Amortisasi biaya tambahan pinjaman
- d. Beban pembiayaan sewa pembiayaan
- e. Perbedaan nilai tukar dari pinjaman mata uang asing yang dianggap sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga.

Entitas harus mengakui seluruh biaya pinjaman sebagai beban pada laporan laba rugi di periode terjadinya.

19. Penurunan nilai aset

Bab 22 paragraf 1 menjelaskan tentang Kerugian penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Entitas harus segera mengakui segera kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi. Entitas harus mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 22.2 untuk setiap kelompok aset berikut :

- a. Pinjaman yang diberikan dan piutang
- b. Persediaan
- c. Aset tetap
- d. Properti investasi
- e. Aset tidak berwujud
- f. Investasi pada entitas asosiasi

g. Investasi pada *joint venture*

20. Imbalan kerja

Bab 23 paragraf 1 menjelaskan tentang Imbalan kerja adalah semua bentuk imbalan yang diberikan entitas sebagai pertukaran jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk untuk direktur dan manajemen. Klasifikasi ada 4: imbalan kerja jangka pendek, panjang, paskakerja dan pesangon.

Entitas mengakui biaya atas seluruh kewajiban imbalan kerja yang menjadi hak pekerja akibat jasa yang diberikan kepada entitas selama periode pelaporan, (SAK-ETAP, bab 23(2))

- a. Sebagai kewajiban setelah dikurangi jumlah yang dibayar, atau aset dibayar dimuka jika terdapat kelebihan pembayaran
- b. Sebagai beban kecuali dipersyaratkan oleh PSAK lain.

21. Pajak penghasilan

Bab 24 paragraf 2 menjelaskan tentang Pajak penghasilan termasuk seluruh pajak domestic dan luar negeri sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak misalnya pemungutan dan potongan pajak, yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau joint venture atas distribusi ke entitas pelapor.

Entitas mengakui kewajiban pajak periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika terdapat kelebihan bayar maka diakui sebagai aset. (SAK ETAP, bab 24 paragraf 3).

Entitas mengungkapkan secara terpisah komponen-komponen utama beban pajak penghasilan. (SAK ETAP, bab 24 paragraf 4).

22. Mata uang pelaporan

Pada bab 25 paragraf 2 menjelaskan tentang Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Laporan keuangan dimaksud untuk memberikan informasi finansial tentang kinerja, posisi keuangan, dan arus kas entitas. Laporan keuangan dihasilkan dari catatan akuntansi entitas, sehingga mata uang yang digunakan dalam catatan akuntansi adalah mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan.

Dengan konsep ini, prosedur pengukuran kembali dari catatan akuntansi laporan keuangan atau penjabaran laporan keuangan tidak diperlukan lagi, karena pada hakikatnya laporan keuangan telah disajikan pada mata uang fungsionalnya. (SAK ETAP, bab 25 paragraf 8)

23. Transaksi dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat pada pengakuan awal dengan menggunakan kurs tunai pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, entitas harus melaporkan :

- a. Pos moneter dengan kurs tanggal neraca
- b. Pos non moneter yang diukur dengan biaya perolehan historis dengan kurs pada tanggal transaksi
- c. Pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dengan kurs pada tanggal nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian diakui pada beban tahun berjalan dan keuntungan atau kerugian yang terkait langsung dengan transaksi ekuitas dibebankan ke ekuitas.

24. Peristiwa setelah akhir periode pelaporan

Pada bab 27 paragraf 2 menjelaskan tentang Peristiwa setelah akhir periode pelaporan adalah peristiwa-peristiwa, baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan, yang terjadi setelah akhir periode pelaporan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Dua jenis peristiwa setelah tanggal neraca:

- a. Peristiwa yang memberikan bukti atas suatu kondisi yang telah terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian)
- b. Peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian.

25. Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Pada bab 28 paragraf 3 menjelaskan tentang Entitas harus memberikan pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangannya untuk memberikan perhatian pada kemungkinan posisi keuangan dan laba atau rugi entitas yg telah terpengaruh adanya pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta transaksi dan saldo dengan pihak-pihak tersebut. SAK ETAP, Pihak-pihak berikut tidak dianggap sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa :

- a. Dua entitas yang memiliki satu direktur
- b. Dua venture karena mereka berbagi pengendalian bersama
- c. Pihak-pihak berikut dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas :
penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan umum, dan departemen
Dan instansi pemerintah

- d. Pelanggan, pemasok, pemilik hak warlaba (*franchisor*), distributor atau agen umum yang mana entitas mengadakan transaksi usaha.

Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas dari harga yang dibebankan.

2.2.5 Pengakuan Unsur-unsur Laporan Keuangan

Menurut SAK ETAP nomor 2 paragraf 24, pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir ke entitas
- b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Penjelasan pengakuan unsur laporan keuangan dalam SAK ETAP 2016 sebagai berikut :

1. Aset

Diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya di pandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi (SAK-ETAP : bab 2 paragraf 34).

2. Kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca, apabila pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal (SAK ETAP bab 2 paragraf 35).

3. Penghasilan

Merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal (SAK ETAP bab 2 paragraf 2.38).

4. Beban

Penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi penanam modal. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal (SAKETAP bab 2 paragraf 37).

5. Laba atau Rugi

Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan (SAK ETAP bab 2 paragraf 38).

2.2.6 Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Menurut SAK ETAP nomor 2 paragraf 30, menjelaskan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar tertentu. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan:

1. Biaya historis. Aset jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima.
2. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antar pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar

2.2.7 Penyajian Laporan Keuangan

Menurut SAK ETAP nomor 3 paragraf 6 penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali :

- a. Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi.
- b. SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian.

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan, dan beban.

Dalam SAK ETAP nomor 3 paragraf 9 menyatakan bahwa informasi harus diungkap secara komperatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komperatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan arus kas. Jika laporan keuangan termasuk komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Disamping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan (SAK ETAP, nomor 3 paragraf 16) :

- a. Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir
- b. Tanggal dan periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan
- c. Mata uang pelaporan
- d. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah

2.3.1 Pengertian

Di dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan UMKM adalah :

“Entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang memenuhi definisi dan kriteria-kriteria usaha mikro kecil dan menengah yang berlaku di Indonesia.”

UMKM merupakan suatu usaha produktif yang didirikan oleh masyarakat, dalam bentuk perseorangan atau badan usaha. UMKM sampai sekarang ini memiliki jumlah yang besar dan terbukti bertahan terhadap krisis ekonomi atau permasalahan ekonomi saat ini (Farida, 2016)

Sedang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai :

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.3.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dalam Pasal nomor 6 yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah menyebutkan kriteria-kriteria untuk menggolongkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00
2. Usaha Kecil :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Tabel 2.2

Tabel Kriteria UMKM

Golongan Usaha	Jumlah Pegawai	Penjualan/ Tahun	Total Aset
Mikro	≥ 4	≤ 300 juta	≤ 50 juta
Kecil	5-19	≥ 300 juta – 2,5 milyar	>50 juta- ≤ 500 juta
Menengah	20-99	$>2,5$ milyar- 50milyar	≥ 500 juta– ≤ 10 milyar

Sumber: Undang-undang no 20 tahun 2008 tentang usaha mikro

2.4 Penelitian Terdahulu

Selain teori-teori yang dipaparkan di atas, penelitian ini juga akan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu akan menunjukkan gambaran alur serta hasil dari sebuah penelitian dengan tema yang serupa. Keberadaannya akan sangat penting untuk menguatkan orisinalitas penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lain yang pernah dilakukan.

Beberapa penelitian dengan tema analisis laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, di antaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

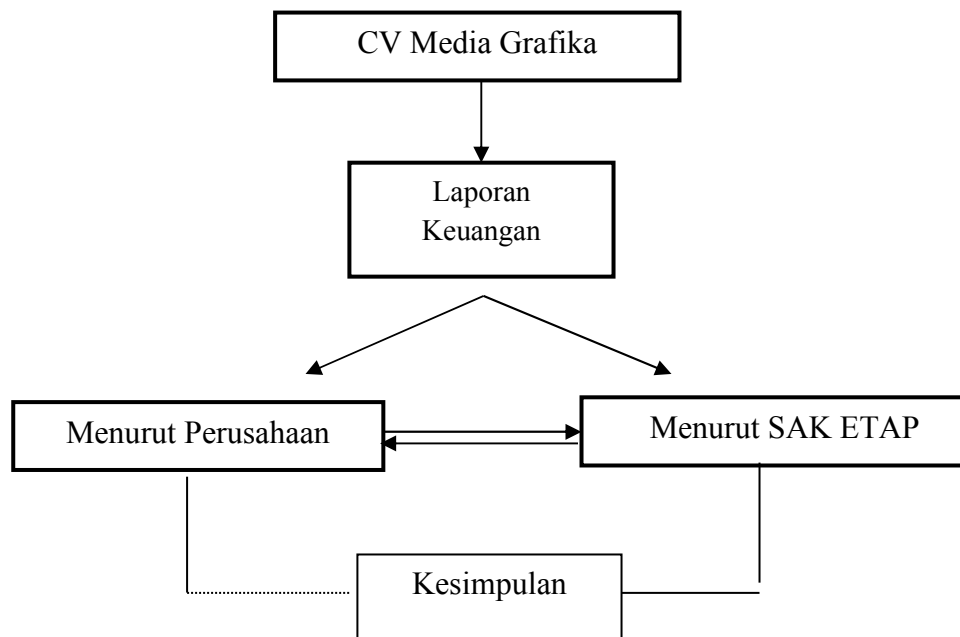
Daftar Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurlela dan Heny Elvia (2016)	Penerapan Laporan Keuangan Usaha Kecil Menengah Berbasis SAK ETAP Pada Toko Jamu Nikisami	Deskriptif kualitatif	Toko Jamu Nikisami telah melakukan pencatatan atas transaksi keuangan sebatas pengetahuan pemilik. Pencatatan yang telah dibuat, yaitu: penjualan, pembelian, pembayaran gaji dan pembayaran lain - lain. Namun, konsep pencatatan belum sesuai dengan SAK ETAP
2	Misnawati Raquf (2018)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada	Deskriptif kualitatif	Berdasarkan penelitian dari dua belas UMKM pengrajin sutera diketahui bahwa hanya ada satu UMKM pengrajin sutera yang menerapkan SAK ETAP dan sebelas UMKM

		Usaha Mikro Kecil Menengah Sutura Di Sengkang		pengrajin sutera lainnya tidak menerapkan SAK ETAP.
3	Iffah Qoni'ah (2018)	Analisis Praktik Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada UMKM	Deskriptif Kualitatif	Laporan keuangan yang disusun oleh UD Surya Abadi Furniture sudah sepenuhnya menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP), perusahaan sudah menyajikan laporan keuangan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca
4	Ade Astalia, Jullie J.S, Lintje Kalangi (2014)	Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Penyajian Laporan Keuangan PT Nichindo Manado Suisan	Deskriptif kompara Tif	Perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta terjadi inkonsistensi dalam penyajian beberapa pos pada Neraca yang tidak diungkapkan dalam CALK.
5	M. Ainul Fadlol, Dkk (2018)	Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntablitas Publik Pada Oryza Mart	Deskriptif kompara Tif	Laporan keuangan dari Oryza mart masih belum memenuhi kelengkapan SAK ETAP. Di mana Oryza mart hanya membuat laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal, namun belum menyusun laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2.5 Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Berikut adalah kerangka berpikir yang dapat penulis gambarkan. Alurnya akan dimulai dari menemukan UMKM untuk dijadikan objek penelitian. Setelah itu, penulis akan menganalisis lebih lanjut terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh CV Media Grafika untuk menyesuaikan pos demi pos laporan keuangan tersebut dengan SAK ETAP yang berlaku. Dari hasil analisis tersebut, akan diketahui sebuah kesimpulan yang berupa apakah laporan keuangan CV Media grafika sudah sesuai dengan SAK ETAP atau sebaliknya, belum sesuai.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada CV Media Grafika di jalan Arung Teko no 50, Sudiang, Makasar. CV Media Grafika merupakan salah satu UMKM yang masuk dalam golongan menengah dengan fokus pada kegiatan industri makanan siap saji. Waktu yang direncanakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah selama kurang lebih dua bulan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif yang akan dibutuhkan pada penelitian ini misalnya adalah gambaran umum dari CV Media Grafika berikut dengan struktur organisasi yang dimiliki oleh entitas.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai pencatatan dan penyajian laporan keuangan CV Media Grafika.

Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Sumber dari data-data yang penulis peroleh adalah berasal dari:

1. Data primer :

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan

sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu. Data primer yang peneliti maksud, dapat berupa hasil dari kegiatan wawancara atau observasi. Data ini bisa bersumber dari informan yaitu Bagian Akunting dari CV Media Grafika.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang muncul dalam penelitian ini dapat berupa laporan keuangan, bukti transaksi, faktur atau nota, jurnal-jurnal ilmiah tentang penelitian terdahulu, dan lain sebagainya. Data ini bisa bersumber dari CV Media Grafika, Internet, dan Perpustakaan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2016;224) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti untuk mendapatkan data-data tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Menurut Muri (2014) wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan seputaran variabel penelitian kepada informan baik itu dalam pertanyaan langsung ataupun dalam bentuk pertanyaan tertulis.

b. Observasi

Oleh Burhan Bungin (2001;115) observasi diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui kerja pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya. observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini berguna untuk mengetahui secara langsung tentang alur yang sebenar-benarnya dari sebuah transaksi yang berakhir pada sebuah laporan keuangan.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2006;231), metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

Penelitian ini memerlukan beberapa dokumen seperti bukti transaksi serta laporan keuangan yang telah dibuat oleh CV Media Grafika. Selain itu, penelitian ini juga membutuhkan SAK ETAP yang digunakan sebagai acuan dalam penganalisan data-data.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah komparatif dengan pendekatan deskriptif. Di mana analisis data komparatif merupakan proses analisis yang dilakukan dengan membandingkan teori-teori yang ada dengan praktik yang telah terjadi di dalam perusahaan kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut. Analisis deskriptif merupakan metode analisis di mana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan

dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi masalah yang dihadapi. (Astalia, 2014)

Proses analisis data yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sebelum terjun ke lapangan sehingga mendapatkan informasi atau data-data sekunder seperti data hasil penelitian terdahulu dan teori pendukung lainnya yang akan berguna dan dibutuhkan dalam setiap proses penelitian. Namun, data-data tersebut masih berupa data mentah dan belum teratur sehingga masih diperlukan tahap analisis kembali agar menjadi suatu data matang dan teratur.

2. Pendiskripsian

Data-data yang telah terkumpul akan didiskripsikan sehingga memberikan keterangan yang lengkap mengenai masalah yang terjadi. Pada tahap ini, peneliti akan memaparkan pos dan laporan-laporan yang telah dimiliki oleh CV Media Grafika.

3. Perbandingan

Diskripsi-diskripsi dari laporan keuangan CV Media Grafika yang telah diuraikan sebelumnya kemudian akan dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Yang Berlaku.

4. Penarikan Kesimpulan

Dari hasil membandingkan dan mengevaluasi di atas, peneliti akan mendapatkan kesimpulan tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian laporan

keuangan CV Media Grafika terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

4.1.1 Profil CV Media Grafika

CV Media Grafika resmi berdiri pada tahun 2001. Merupakan salah satu distributor mesin foto copy baru dan rekondisi terbesar di Sulawesi Selatan. Pangsa pasar mereka mencakup seluruh area Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, serta beberapa daerah di Ambon dan Jayapura. Tidak hanya menyediakan mesin fotocopy, CV Media Grafika juga menjual seluruh spare parts serta toner dari mesin fotocopy tersebut. Sebagai layanan yang lain, mereka juga menyediakan jasa teknik untuk perbaikan mesin-mesin fotocopy milik pelanggan yang mengalami kendala. Tak juga hanya menjual, CV Media Grafika cukup berstrategi dengan memberikan jasa sewa sewa dengan sistem bagi hasil kepada beberapa pihak yang belum sanggup untuk membeli mesin fotocopy yang harganya terbilang cukup tinggi. Maka artinya, CV Media Grafika adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi , jasa, sekaligus retail.

CV Media Grafika merupakan perusahaan perseorangan yang seluruh asetnya dimiliki oleh Bapak Bambang Sihwanto sebagai pemilik. Berlokasi di jalan Arung Teko nomor 50 Sudiang dan beberapa lokasi cabang yang lain. Saat ini, CV Media Grafika memiliki pegawai lebih dari enam puluh orang yang tersebar di berbagai cabang. Dalam memasarkan produknya, CV Media Grafika juga telah bekerja sama dengan berbagai *freelancer* mesin foto copy yang berada

di daerah-daerah. Tumbuh besar bertahun-tahun, CV Media Grafika berhasil mencatat laba bersih hingga kisaran 2,2 milyar per tahun.

Persaingan pasar mesin fotocopy di daerah Sulawesi Selatan kian ketat tiap tahunnya. CV Media Grafika bertahan dengan terus berusaha mencukupi seluruh kebutuhan pelanggan dengan harga-harga yang cukup bersanding juga kualitas yang mumpuni. Selain itu CV Media Grafika memiliki strategi untuk menjaring pelanggan baru, yakni dengan cara membuat pameran mesin fotocopy dengan pemberian diskon yang beragam sebagai daya tariknya. Dalam internal perusahaan, CV Media Grafika juga selalu berusaha mengayomi dan mempererat tali persaudaraan di antara seluruh pegawainya melalui acara-acara gathering yang selalu diadakan tiap tahun. CV Media Grafika percaya mereka akan sanggup bertahan dan berkembang selama mereka mengerti apa itu kerja sama.

4.1.2 Visi dan Misi Media Grafika

1. Visi

Setiap orang puas dan senang dengan produk serta layanan kami.

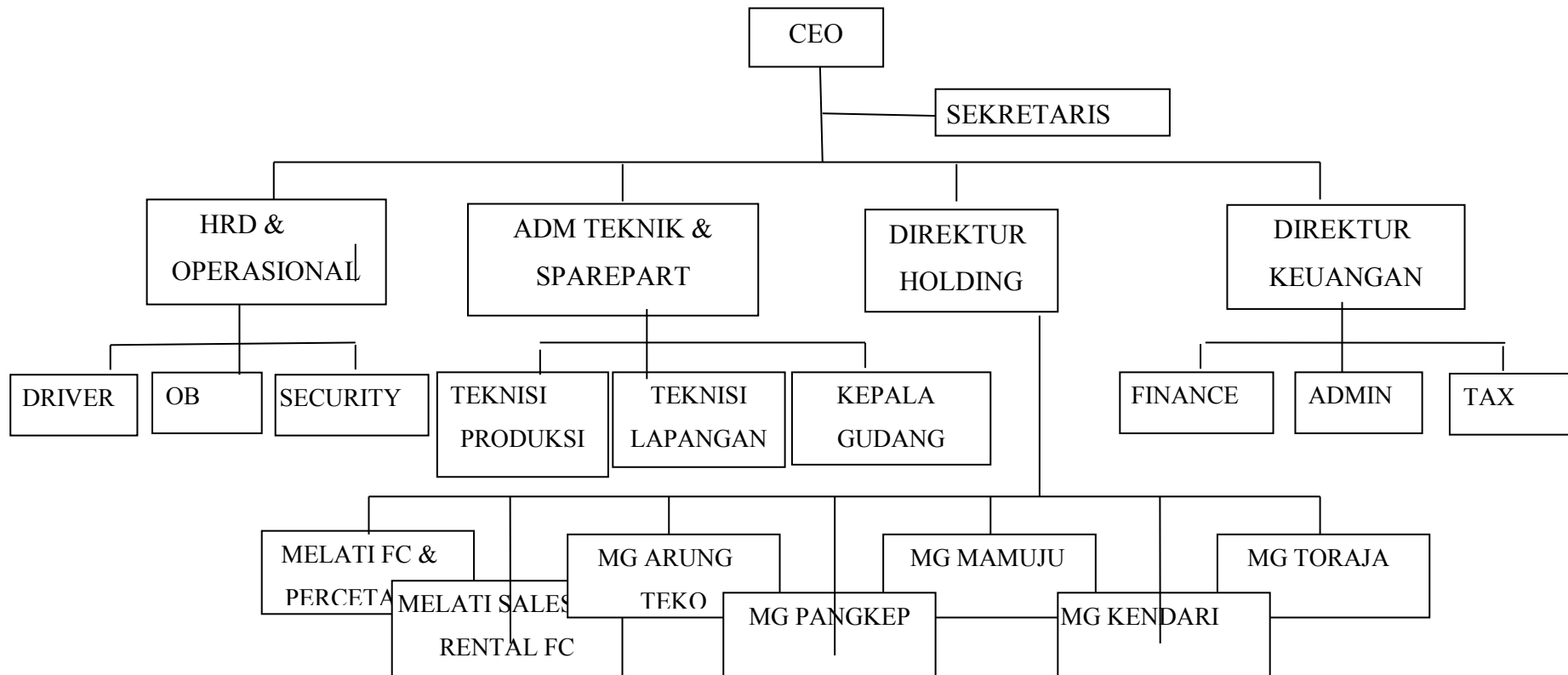
2. Misi

- a. Memberikan layanan yang memuaskan dan solusi bernilai tambah kepada seluruh konsumen
- b. Membangun sumber daya manusia yang profesional untuk kesejahteraan dan kemajuan bersama
- c. Mengembangkan produk-produk dan layanan yang inovatif di bidang teknologi mesin foto copy sesuai dengan harga pasar dengan harga terjangkau

- d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan sosial.

4.1.3 Struktur Organisasi CV Media Grafika

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



4.1.4 Alur Transaksi di CV Media Grafika

1. Pembelian Barang

Pembelian barang di CV Media Gradika terbagi atas dua, yakni pembelian kredit dan pembelian tunai. Transaksi dengan nominal relatif kecil akan dibayar dengan tunai. Sedangkan pembelian dengan nominal besar akan selalu menggunakan perjanjian kredit. Proses Pembelian barang secara kredit dapat didiskripsikan dengan alur seperti di bawah ini:

- a. Pihak gudang selalu melakukan *stock opname* di pengujung bulan. Persediaan-persediaan *spare parts*, tinta, dan sekaligus mesin akan terlihat jumlah fisiknya di sana. Dan persediaan yang nyaris habis atau berjumlah sedikit akan dimasukkan dalam order pembelian. Pihak gudang pula yang akan memasukkan kuantitas dan kualitas barang yang dibutuhkan.
- b. Formulir Order Pembelian tersebut akan dimasukkan ke bagian *Finance*. *Finance* dibantu dengan akunting akan meninjau kembali kemampuan keuangan perusahaan dengan jumlah barang yang sebaiknya dibeli.
- c. Setelah disesuaikan, formulir order tersebut harus disalurkan menuju direktur utama untuk meminta persetujuan akhir.
- d. Apabila formulir disetujui oleh direktur utama maka, pihak *finance* akan melakukan transaksi via telepon dan email kepada pihak suplaiyer.
- e. Dari suplaiyer, CV Media Grafika akan diberikan jumlah harga atas seluruh barang yang dipesan.

- f. Biasanya transaksi seperti ini berjumlah sangat besar dan dilakukan secara kredit. Kaitannya dengan pelunasan, CV Media Grafika menggunakan Giro untuk membayar angsurannya.
- g. Barang akan tiba dengan kelengkapan nota dan surat jalan. Pihak Gudang yang menerima dan mengecek kesesuaian barang yang dibeli dengan barang yang tiba.
- h. Nota dan surat jalan tersebut, harus dimasukkan ke pihak akunting untuk dicatat sebagai pembelian kredit.
- i. Juga dimasukkan kepada pihak finance sebagai dasar pembuatan giro untuk pelunasan.

Dalam bagian ini, transaksi dicatat sebagai berikut :

Persediaan Barang Dagang	xxx	
Kas/Bank/Utang Usaha		xxx
Pelunasan akan dicatat		
Utang/usaha	xxx	
Bank/Giro		xxx

2. Produksi

Selain penjualan langsung, CV Media Grafika juga merupakan perusahaan yang mengolah barang setengah jadi yakni mesin fotocopy rekondisi untuk menjadi mesin fotocopy yang siap digunakan untuk memproduksi kembali. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak teknisi. Alurnya meliputi :

- a. Pengambilan mesin fotocopy dari gudang dengan sepengetahuan pihak gudang
- b. Pengecekan keadaan mesin
- c. Pengambilan *spare part* untuk perbaikan mesin yang juga harus dengan sepengetahuan pihak gudang.
- d. Mesin yang telah siap berproduksi akan dikumpulkan dengan mesin-mesin jadi yang lain.

3. Penjualan dan Pemasukan

Sama halnya dengan pembelian, penjualan yang terjadi di CV Media Grafika juga meliputi penjualan tunai dan penjualan kredit. Semua itu bergantung dari pelanggan. Namun biasanya untuk efektivitas keuangan, pelanggan yang membeli sebuah mesin fotocopy dengan harga di atas Rp35.000.000 akan memilih jalan kredit. Alur penjualan kredit dapat didiskripsikan sebagai berikut :

- a. Permohonan kredit oleh pelanggan melalui bagian penjualan. Persetujuan atau tidaknya akan diberikan langsung oleh direktur.
- b. Apabila disetujui, pihak penjualan akan mengabarkan. Lalu barang siap diantar dengan kelengkapan surat jalan, surat perjanjian, juga faktur penjualan.
- c. Meskipun secara kredit, namun biasanya transaksi ini harus disertakan dengan uang DP. Uang DP tersebut akan diserahkan kepada *finance*, sedang faktur penjualan dan kuitansi akan disalurkan menuju akunting.
- d. Selanjutnya adalah tugas penagihan untuk memastikan kredit pelanggan terbayarkan dengan lancar tiap bulannya.

Pemasukan dari piutang bisa melewati bank dan tunai. Apabila dilakukan dengan cara tunai, pihak penagih akan menyerahkan uang tersebut kepada *finance*. Sedang apabila melalui bank, maka pelanggan hanya perlu melapor serta melampirkan bukti pemindahbukuan dana.

Pencatatan yang terjadi untuk transaksi penjualan adalah sebagai berikut :

Kas/Bank/Piutang	xxx	
Penjualan		xxx

Sedang untuk pelunasan piutang, akan dicatat dengan jurnal :

Kas/Bank	xxx	
Piutang Usaha		xxx

4. Sewa dan Bagi hasil

Terkadang ada beberapa orang atau instansi yang lebih memilih sewa dan bagi hasil dibandingkan dengan membeli. Mereka lebih suka membayar per lembar yang dihasilkan dibanding dengan melakukan sekali investasi untuk mendapatkan sebuah mesin fotocopy yang bisa mereka berdayakan untuk dirinya sendiri. pasalnya, CV Media Grafika memberikan penawaran menarik untuk konsumen sewa dan bagi hasilnya, dengan memberikan fasilitas perbaikan secara gratis apabila terjadi kerusakan pada mesin. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi jika CV Media Grafika dipercaya oleh berbagai instansi pemerintah untuk pengadaan mesin di kantor-kantor mereka. Berikut ini adalah alur sewa dan bagi hasil yang diberlakukan oleh CV Media Grafika.

- a. Diadakan pembicaraan dengan calon klien yang biasanya akan membahas tentang seluk-beluk dan peraturan sewa serta bagi hasil mesin. Dalam hal ini

akan dibahas perihal jenis mesin, harga, serta jangka waktu sewa dan bagi hasil.

- b. Apabila terjadi kesepakatan, maka CV Media Grafika akan mengantar mesin tersebut ke alamat klien dengan membawa serta satu rangkap surat perjanjian berikut dengan kwitansi pembayaran.
- c. Selanjutnya, pihak penagihan yang akan bertugas mengecek jumlah fotocopy yang dilakukan oleh klien serta kemudian membuat kwitansi untuk menagih pembayaran.

Sewa dan bagi hasil akan menimbulkan pendapatan bagi perusahaan. oleh karena itu, sewa dan bagi hasil akan dicatat dengan jurnal :

Kas/Bank	xxx
Pendapatan Rental	xxx

5. Biaya dan Pengeluaran

Nyaris seluruh biaya dan pengeluaran keuangan di CV Media Grafika berpusat pada bagian *finance*. Hanya saja, dibuat sebuah kebijakan untuk memudahkan segala mobilisasi yang terjadi di dalam organisasi. Kebijakan itu di antaranya :

- a. Dibuat kas kecil yang diisi dengan dana Rp1.000.000 untuk membiayai segala keperluan rumah tangga perusahaan. Oleh *finance*, wewenang kas kecil diserahkan kepada pihak admin dan penjualan yang setiap hari selalu berada di tempat. Apabila dana habis. bagian admin yang akan melapor kepada *finance* untuk melakukan pengisian ulang. Dalam tahap ini, pertanggungjawaban dana kas kecil akan diteliti.

- b. Biaya-biaya di atas Rp1.000.000 akan dibayar langsung oleh pihak *finance*.
- c. Sebagian besar angsuran utang dibayar dengan menggunakan giro yang telah dibuatkan di awal, sebagian lagi dibayar dengan pemindahbukuan dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Penggajian dilakukan setiap tanggal satu atau dua. Sebagian melalui transfer bank sebagian lagi melalui tunai.

Untuk mencatat beban dan pengeluaran, berikut adalah ayat jurnalnya :

Beban	xxx	
		Kas
		xxx

4.2 Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan CV Media Grafika dengan Standar Akuntabilitas Keuangan Entitas Tanpa Akutabilitas Publik.

Seperti yang telah dijelaskan di awal SAK ETAP diperuntukkan untuk entitas yang akuntabilitasnya tidak signifikan serta pembuatan laporan keuangan adalah untuk tujuan umum. CV Media Grafika yang belum tergabung dan tidak berada dalam tahap mendaftarkan diri ke bursa efek diharapkan dapat membuat laporan keuangan yang telah berdasarkan SAK ETAP ini.

4.2.1 Analisis kesesuaian laporan keuangan

Pada tanggal 17 Januari 2020 telah dilakukan wawancara dengan bagian akunting dari CV Media Grafika. Dari sesi tersebut didapatkan hasil bahwa CV Media Grafika telah membuat laporan keuangannya dan disajikan dalam bentuk laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas. Laporan keuangan Media Grafika ini diperuntukkan untuk kontrol pemimpin,

bahan untuk mendapatkan pinjaman dari bank, juga sebagai dasar pengenaan pajak.

Di bawah ini adalah penjelasan terperinci tentang apa-apa saja yang disajikan dalam laporan keuangan milik CV Media Grafika :

1. Neraca

Dari keterangan bagian akunting CV Media Grafika yaitu saudara Abdul Gafur, didapatkan pernyataan bahwa perusahaan membuat neraca untuk mengetahui posisi keuangan serta terutama untuk mengontrol pergerakan aset dan utang perusahaan. Neraca yang dibuat oleh CV Media Grafika berbentuk T, dengan membagi sisi aktiva dan pasiva.

Sisi aktiva dari neraca CV Media Grafika terdiri atas aktiva lancar (kas kecil, bank, persediaan mesin, persediaan toner, persediaan sparepart, piutang dagang, piutang lain-lain, perlengkapan) serta aktiva tetap (tanah, gedung, kendaraan). Sedangkan kolom pasiva, terdiri atas kewajiban (utang usaha, utang lain-lain) dan ekuitas (modal). Dasar melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan ini didasarkan pada biaya historis dan nilai wajar yaitu berdasarkan harga perolehannya.

2. Laporan Laba Rugi

Masih dari Abdul Gafur, diketahui bahwa CV Media Grafika membuat laporan laba rugi untuk mengendalikan pendapatan dan beban hingga menghasilkan sebuah laba dalam satu periode tertentu. Laba tersebut yang biasanya akan pemimpin acuan untuk mengevaluasi kinerja karyawannya. Laporan laba rugi yang disusun oleh CV Media Grafika memuat penjualan mesin,

sparepart, dan toner yang dikurangkan dengan harga pokok penjualan, dan kemudian dikurangkan dengan seluruh biaya produksi dan biaya administrasi yang terjadi untuk menunjang operasi perusahaan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Selain itu, CV Media Grafika juga telah menyusun laporan perubahan ekuitas. Jenis laporan ini dibuat untuk memberikan informasi terkhusus pada pimpinan tentang pergerakan modal yang beliau miliki selama periode tertentu. Laporan perubahan modal terdiri atas saldo modal periode sebelumnya dijumlahkan dengan laba tahun berjalan.

4. Laporan Arus Kas

Di luar tiga laporan di atas, CV Media Grafika juga telah membuat laporan arus kas. Laporan ini biasanya mereka buat untuk keperluan perbankan. Dalam laporan arus kas akan dimuat jumlah kas masuk operasi yang dikurangkan dengan kas keluar operasi untuk mendapatkan angka berupa saldo kas yang ada di perusahaan.

Hanya saja, CV Media Grafika tidak membuat catatan atas laporan keuangan yang biasanya memuat penjelasan dan tambahan informasi untuk mendukung empat laporan sebelumnya. Menurut penuturan Abdul Gafur, keberadaan CALK tak terlalu berpengaruh bagi internal perusahaan. Dan lagipula, laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan arus kas, telah menjelaskan semua pos yang harus diketahui.

Tabel 4.1
Analisis pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan.

SAK ETAP	CV. MG		Hasil analisis
	Ada	Tidak ada	
Pengakuan Unsur-unsur laporan keuangan			
Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut :	✓		Sesuai
1. Kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut mengalir ke entitas			
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang bisa diukur dengan andal	✓		Sesuai
Penjelasan pengakuan unsur laporan keuangan dalam SAK ETAP 2016 sebagai berikut :			
1. Aset Aset diakui di neraca jika manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai biaya yang dapat diukur dengan handal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif.	✓		Sesuai
2. Kewajiban Kewajiban diakui dalam neraca apabila pengeluaran sumber daya digunakan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.	✓		Sesuai
3. Penghasilan Penghasilan dapat diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang berasal dari kontribusi penanam modal.	✓		Sesuai
4. Beban Beban diakui jika penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan	✓		Sesuai

ekuitas yang tidak terhubung dengan distribusi penanam modal. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset telah terjadi dan dapat diukur dengan andal			
5. Laba atau rugi Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban.	✓		Sesuai
Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan			
Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan : Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Dasar dalam proses ini antara lain :			
1. Biaya historis. Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima.	✓		Sesuai
2. Nilai wajar adalah jaminan yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban.	✓		Sesuai
Penyajian Laporan Keuangan			
Bab 4 : Neraca Adalah bahian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada periode tertentu yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Pos-pos minimal yang harus terkandung dalam neraca adalah:			
1. Kas, setara kas	✓		Sesuai
2. Piutang usaha dan piutang lainnya	✓		Sesuai
3. Persediaan	✓		Sesuai
4. properti investasi	✓		Sesuai
5. aset tetap	✓		Sesuai
6. aset tidak berwujud		✓	Tidak disajikan
7. utang usaha dan utang lainnya	✓		Sesuai
8. aset dan kewajiban pajak	✓		Sesuai
9. Kewajiban diestimasi		✓	Tidak disajikan
10. Ekuitas	✓		Sesuai
Klasifikasi Aset, didasarkan pada:			
1. Diperkirakan akan terealisasi dalam waktu	✓		Sesuai

siklus normal operasi entitas.			
2. Dimiliki untuk diperdagangkan	✓		Sesuai
3. Diharapkan akan terealisasi dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan.	✓		sesuai
4. Berupa kas atau setara kas	✓		Sesuai
5. Selain itu diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar	✓		Sesuai
Klasifikasi Kewajiban, didasarkan pada :			
1. Diperkirakan akan terealisasi dalam waktu siklus normal operasi entitas.	✓		Sesuai
2. Dimiliki untuk diperdagangkan	✓		Sesuai
3. Diharapkan akan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan.	✓		Sesuai
4. Selain itu diklasifikasikan sebagai kewajiban tidak lancar.	✓		Sesuai
Bab 5 : Laporan Laba rugi Laporan laba rugi menyajikan penghasil dan beban pada suatu periode yang digunakan untuk menunjukkan kinerja keuangan. Pos-pos yang tercakup dalam laporan laba rugi adalah :	✓		Sesuai
1. Pendapatan	✓		Sesuai
2. Beban	✓		Sesuai
3. Laba atau rugi investasi (metode ekuitas)		✓	Tidak disajikan
4. Beban pajak	✓		Sesuai
5. Laba atau rugi bersih	✓		Sesuai
Bab 6 : Laporan Perubahan Ekuitas Entitas dapat menyajikan laporan yang menunjukkan : Perubahan ekuitas selama satu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.	✓		Sesuai
Bab 7 : Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.	✓		Sesuai
Bab 8 : Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan ini berisi informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan		✓	Tidak disajikan

keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan			
Bab 9 : Kebijakan dan Estimasi Akuntansi Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.	✓		Sesuai
1. Entitas harus memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya.	✓		Sesuai
2. Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas dengan dasar akrual. Penggunaan periodik, perpetual tidak diatur dalam SAK ETAP.	✓		Sesuai
Bab 10 : Investasi Pada Efek Tertentu Mengatur penerapan akuntansi nilai wajar untuk efek berdasarkan harga perolehan. Entitas harus mengklasifikasi pada saat perolehan berdasarkan tujuan manajemen :		✓	Tidak disajikan
1. Dimiliki hingga jatuh tempo		✓	Tidak disajikan
2. Diperdagangkan		✓	Tidak disajikan
3. Tersedia untuk dijual		✓	Tidak disajikan
Bab 11 : Persediaan Persediaan adalah aset :	✓		Sesuai
1. Untuk dijual dalam kegiatan normal usaha	✓		Sesuai
2. Dalam proses produksi untuk kemudian dijual	✓		Sesuai
3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi			
Entitas harus menentukan biaya persediaan selain dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP)/ rata-rata tertimbang.	✓		Sesuai
Bab 12 : Investasi Pada Entitas Asosiasi Dan Entitas Anak 1. Entitas asosiasi : suatu entitas termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan entitas anak dalam <i>joint venture</i> . Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode biaya.		✓	Tidak disajikan
2. Entitas anak : entitas yang dikendalikan oleh induk. Investasi pada anak dicatat dengan metode ekuitas dan tidak dibuatkan laporan konsolidasian.		✓	Tidak disajikan

<p>Bab 13 : Investasi Pada <i>Joint Venture</i> <i>Joint venture</i> merupakan perjanjian kontraktual antara beberapa pihak untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang menjadi pengendalian bersama.</p>		✓	Tidak disajikan
<p>Bab 14 : Properti Investasi Properti investasi adalah tanah dan atau bangunan yang dikuasai yang disewakan atau untuk kenaikan nilai dan bukan digunakan untuk: a. Proses produksi atau penyediaan jasa atau tujuan administasi b. Dijual dalam kegiatan sehari-hari</p>		✓	Tidak disajikan
<p>Pada saat pengakuan, properti investasi diukur dengan biaya perolehan. Setelah perolehan awal maka properti investasi dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.</p>	✓		Sesuai
<p>Bab 15 : Aset Tetap Aset tetap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif. Dan diharapkan dapat digunakann lebih dari satu periode. 	✓		Sesuai
<ol style="list-style-type: none"> 2. Pada saat perolehan, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan : <ol style="list-style-type: none"> a. Harga beli b. Biaya-biaya yang didistribusikan langsung atas perolehan aset tetap. 	✓		Sesuai
<ol style="list-style-type: none"> 3. Beban penyusutan harus diakui dalam laporan laba rugi. Penyusutan tersebut dimulai sejak aset tersedia untuk digunakan. 	✓		Sesuai
<ol style="list-style-type: none"> 4. Metode penyusutan yang digunakan SAK ETAP adalah metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit produksi 	✓		Sesuai
<p>Bab 16 : Aset Tidak Berwujud Aset tidak berwujud : aset non meneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.</p>		✓	Tidak disajikan
<p>Bab 17 : Sewa Klasifikasi sewa tergantung pada substansi trnasaksi dan bukan bentuk hukumnya. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh</p>	✓		Sesuai

manfaat dan risiko kepemilikan aset.			
<p>Bab 18 : Kewajiban Diestimasi</p> <p>Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu atau jumlahnya belum pasti. Entitas mengakui kewajiban diestimasi jika :</p> <p>1. Terdapat kewajiban kini sebagai hasil dari peristiwa masa lalu</p>		✓	Tidak disajikan
2. Kemungkinan terjadi arus keluar manfaat ekonomis pada saat penyelesaian.		✓	Tidak disajikan
3. Jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Jumlah kewajiban diestimasi ditelaah tiap tanggal pelaporan dan memerlukan penyesuaian untuk mencerminkan estimasi terbaik.		✓	Tidak disajikan
<p>Bab 19 : Ekuitas</p> <p>Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akta pendirian yang berlaku.</p> <p>Modal saham meliputi : saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari simangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor.</p>	✓		Sesuai
<p>Bab 20 : Pendapatan</p> <p>Pendapatan terjadi akibat dari :</p> <p>a. Penjualan barang</p> <p>b. Penyediaan jasa</p> <p>c. Kontrak konstruksi</p> <p>d. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain.</p>	✓		Sesuai
	✓		Sesuai
	✓		Sesuai
		✓	Tidak disajikan
	✓		Sesuai
Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima.	✓		Sesuai
<p>Bab 21 : Biaya Pinjaman</p> <p>Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang timbul dari kewajiban keuangan suatu entitas. Termasuk :</p> <p>1. Bunga cerukan bank dan pinjaman jangka panjang dan pendek</p> <p>2. Amortisasi diskonto atau premium pinjaman</p> <p>3. Amortisasi biaya tambahan pinjaman</p> <p>4. Perbedaan nilai tukar dari pinjaman mata uang asing yang dianggap sebagai penyesuaian</p>	✓		Sesuai
		✓	Tidak disajikan
		✓	Tidak disajikan
		✓	Tidak disajikan

terhadap biaya bunga. Entitas harus mengakui seluruh biaya pinjaman sebagai beban pada laporan laba rugi di periode terjadinya.	✓		Sesuai
Bab 22 : Penurunan Nilai Aset Kerugian penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Entitas harus mengakui sesegera mungkin kerugian penurunan nilai dalam laporan rugi laba. Entitas harus mengungkapkan informasi yang disyaratkan untuk setiap kelompok aset tersebut :			
1. Pinjaman yang diberikan piutang		✓	Tidak disajikan
2. Persediaan		✓	Tidak disajikan
3. Aset tetap		✓	Tidak disajikan
4. Properti investasi		✓	Tidak disajikan
5. Aset tidak berwujud		✓	Tidak disajikan
6. Investasi pada entitas asosiasi		✓	Tidak disajikan
7. Investasi pada joint venture		✓	Tidak disajikan
Bab 23 : Imbalan Kerja Imbalan kerja yaitu semua bentuk imbalan yang diberikan entitas sebagai pertukaran jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. Imbalan kerja diklasifikasikan menjadi empat : imbalan kerja jangka pendek, jangka panjang, pascakerja dan pesangon. Entitas mengakui biaya atas seluruh kewajiban imbalan kerja yang menjadi hak pekerja akibat jasa yang diberikan kepada entitas.	✓		Sesuai
1. Sebagai kewajiban setelah dikurangi jumlah yang harus dibayar, atau aset dibayar dimuka jika terdapat kelebihan pembayaran.			
2. Sebagai beban kecuali dipersyaratkan oleh PSAK lain.			
Bab 24 : Pajak Penghasilan 1. Pajak penghasilan termasuk seluruh pajak domestik dan luar negeri sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak misalnya pemungutan dan pemotongan pajak, yang	✓		Sesuai

terutang oleh entitas.			
2. Entitas mengakui kewajiban pajak periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika terdapat kelebihan bayar maka diakui sebagai aset.	✓		Sesuai
3. Entitas mengungkapkan secara terpisah komponen utama beban pajak penghasilan		✓	Tidak Sesuai
<p>Bab 25 ; Mata Uang Pelaporan</p> <p>Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.</p> <p>Laporan keuangan yang dimaksud untuk memberikan informasi keuangan tentang kinerja, posisi keuangan, dan arus kas. Laporan keuangan dihasilkan dari catatan akuntansi entitas, sehingga mata uang yang digunakan dalam catatan akuntansi adalah mata uang digunakan dalam laporan keuangan. Dengan konsep ini, prosedur pengukuran kembali dari catatan akuntansi laporan keuangan atau penjabaran laporan keuangan tidak diperlukan lagi karena pada hakikatnya laporan keuangan telah disajikan pada mata uang fungsional.</p>	✓		Sesuai
<p>Bab 26 : Transaksi Mata Uang Asing</p> <p>Transaksi dalam mata uang asing dicatat pada pengakuan awal dengan menggunakan kurs tunai pada tanggal transaksi. Di akhir periode, entitas harus melaporkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pos moneter dengan kurs tanggal neraca 2. Pos non meneter yang diukur dengan biaya perolehan historis dengan kurs pada tanggal transaksi. 3. Pos moneter yang diukur pada nilai wajar dengan kurs pada tanggal nilai wajar 		✓	Tidak disajikan
Keuntungan atau kerugian diakui pada beban tahun berjalan dan keuntungan atau kerugian yang terkait langsung dengan transaksi ekuitas dibebankan ke ekuitas.		✓	Tidak disajikan
<p>Bab 27 : Peristiwa Setelah Periode Pelaporan</p> <p>Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan, yang terjadi setelah akhir periode sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan.</p>		✓	Tidak disajikan
<p>Bab 28 : Pengungkapan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa</p> <p>Entitas harus melaporkan pengungkapan yang</p>			

diperlukan dalam laporan keuangan untuk memberikan perhatian pada kemungkinan posisi keuangan dan laba atau rugi entitas yang telah terpengaruh dengan adanya pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta transaksi dan saldo dengan pihak-pihak tersebut.		✓	Tidak disajikan
Dalam SAK ETAP, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut antara lain : 1. Dua entitas yang memiliki satu direktur 2. Dua venture karena mereka berbagi pengendalian bersama 3. Pihak-pihak berikut dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas : penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan umum, dan departemen. 4. Pelanggan, pemasok, pemilik hak waralaba, distributor yang mana entitas mengadakan transaksi usaha.		✓	Tidak disajikan
Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas dari harga yang dibebankan.		✓	Tidak disajikan

4.2.2 Analisis kebijakan akuntansi.

Menurut SAK ETAP, kebijakan akuntansi mencakup segala prinsip-prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi perlu diungkapkan agar laporan keuangan yang telah disusun bisa dimengerti dengan baik oleh para pemakainya. CV Media Grafika sendiri telah tepat dengan merekrut Abdul Gafur sebagai penanggung jawab akuntingnya. Saudara Abdul Gafur merupakan lulusan sarjana ekonomi yang tentu paham akan seluk beluk laporan keuangan yang baik dan lengkap. Sejak awal penyusunan laporan keuangan, Abdul Gafur yakin telah menerapkan semua kebijakan akuntansi yang

telah diatur SAK sebelumnya demi mendapatkan sepaket laporan keuangan yang akuntabel dan relevan. Berikut adalah kebijakan-kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh CV Media Grafika :

1. Dasar penyusunan laporan keuangan

CV Media Grafika menggunakan *accrual basic* sebagai dasar penyusunan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Untuk laporan arus kas, CV Media Grafika menerapkan metode tidak langsung di mana, laporan tersebut disusun berdasarkan angka-angka dari laporan laba rugi dan neraca. Mata uang yang digunakan dalam perusahaan ini adalah rupiah.

2. Kas dan Setara Kas

Definisi kas dalam penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2011) adalah sumber daya yang mencakup koin, uang kertas, cek, wesel, dan uang di tangan atau simpanan di bank. CV Media Grafika sendiri telah dengan jelas menerapkan kebijakan akuntansi untuk membagi penggunaan kas agar pengendalian jauh lebih mudah dilaksanakan. Dalam hal ini, Kas CV Media Grafika di bagi atas tiga, yaitu kas kecil, kas, dan bank. Kas kecil adalah sebagian kas dengan nominal kecil yang biasanya dipergunakan untuk kebutuhan operasi perusahaan yang nilainya relatif rendah. Kas adalah jumlah uang masuk yang berasal dari penjualan atau dari pelunasan piutang, yang ditampung dan belum sempat disetorkan ke bank. Bank adalah rekening untuk menunjukkan jumlah kekayaan moneter yang dimiliki oleh perusahaan di pihak perbankan.

3. Piutang

Piutang adalah sejumlah nilai yang masih dapat ditagih dari pihak lain dalam bentuk tunai. CV Media Grafika membagi rekening piutang mereka ke dalam piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha jelas erat kaitannya dengan keberadaan penjualan kredit, sedang piutang lain-lain biasanya timbul akibat dari kas bon karyawan. Dan demi menjaga kesehatan keuangan perusahaan, CV Media Grafika mematok angka 30%-45% dari total penjualan bersih sebagai batas aman mereka. Untuk pelunasan piutang usaha sendiri, CV Media Grafika cukup berkompromi dengan menyediakan angsuran tiap bulan dalam jumlah rata hingga piutang tersebut dapat dilunasi. Sedang untuk piutang karyawan, CV Media Grafika biasanya memberikan kebijakan potong gaji dengan jumlah yang biasanya telah disepakati pihak debitur (karyawan).

4. Persediaan barang

Persediaan CV Media Grafika diatur dengan metode MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama). Hal ini diterapkan untuk menghindari kemungkinan mesin fotocopy yang berkarat karena dibiarkan mengendap lama di gudang atau toner yang menggumpal karena tidak segera digunakan. Dalam hal pencatatannya, CV Media Grafika menggunakan metode perpetual di mana admin akan selalu mencatat keluar masuknya barang dalam setiap transaksi pada kartu stok yang tersedia. Hingga normalnya, stok barang dalam kartu stok telah menunjukkan angka yang sebenarnya.

5. Aktiva Tetap

Seluruh Aktiva tetap (kecuali tanah) diakui sebesar harga perolehan yang dikurangi dengan total akumulasi penyusutan. Harga perolehan sendiri dapat diartikan sebagai harga untuk memperoleh suatu aktiva, termasuk di dalamnya harga beli dan biaya-biaya yang berkaitan.

6. Penyusutan

Penyusutan dapat diartikan sebagai proses mengalokasikan biaya yang berasal dari aset tetap menjadi beban selama masa manfaatnya masih ada. Dalam hal ini, CV Media Grafika menggunakan metode garis lurus karena dinilai sebagai metode yang paling mudah digunakan untuk menjelaskan penyusutan sebuah aktiva.

7. Utang

Utang adalah kewajiban yang harus diselesaikan pada waktu tertentu atau masa kini oleh suatu perusahaan kepada krediturnya. Pelunasan utang tersebut didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, baik dari jatuh tempo hingga cara pelunasan dengan tunai atau bank.

8. Modal

Modal merupakan sejumlah dana awal yang digunakan oleh pemilik untuk membangun dan mengembangkan perusahaannya. Modal CV Media grafika berasal dari dana pribadi pemilik dan sebagian adalah dari dana bank.

9. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dapat dikatakan sebagai aliran masuk dari proses operasi perusahaan. Dalam hal ini, pendapatan CV Media Grafika dapat berasal dari

penjualan mesin maupun pendapatan jasa sewa. Untuk beban, CV Media Grafika menggolongkannya sebagai beban penjualan dan beban administrasi.

10. Pajak

Berdiri sebagai badan hukum berbentuk CV, membuat CV Media Grafika secara tak tertulis harus menjalankan kewajiban-kewajibannya, yang di antara lain adalah membayar iuran pajak kepada negara berdasarkan tarif yang berlaku. Sejauh ini, CV Media Grafika telah mengeluarkan pajak penghasilan badan, pajak penghasilan orang pribadi, serta pajak pertambahan nilai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang telah disusun oleh UMKM CV Media Grafika telah sesuai atau tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik, serta dari serangkaian penelitian dan analisis data yang dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menyusun laporan keuangan UMKM, CV Media Grafika nyaris memenuhi dan mematuhi standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanapa Akuntabilitas Publik. Hal ini tercermin dari :
 - a. CV Media Grafika telah membuat empat jenis laporan keuangan dari lima laporan keuangan yang disyaratkan oleh Standar Akuntabilitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Laporan-laporan keuangan yang telah disajikan tersebut antara lain, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Dalam praktiknya, CV Media Grafika belum membuat Catatan Atas Laporan Keuangan, dikarenakan pihak internal merasa keberadaan CALK belum terlalu memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan perusahaan.
 - b. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan seperti aset, kewajiban, penghasilan, beban, dan laba rugi telah memenuhi dua kriteria berupa kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut

mengalir ke entitas serta pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang bisa diukur dengan andal.

- c. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan seperti aset, kewajiban, penghasilan, beban dan laba atau rugi dilakukan dengan berpatok pada biaya historis dan nilai wajar.
 - d. CV Media Grafika juga telah menyajikan elemen-elemen laporan keuangan dengan lengkap. Semua rekening yang timbul diakui dan diukur dengan sesuai yang disyaratkan. Hanya saja ada beberapa elemen yang tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik namun tidak timbul dalam laporan keuangan milik CV Media Grafika. Hal itu terjadi karena tidak adanya aktivitas operasi yang berdampak pada munculnya elemen-elemen tersebut. Elemen yang dimaksudkan di antaranya : kewajiban diestimasi, Investasi pada efek tertentu; investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak; investasi pada joint venture, aset tidak berwujud, transaksi mata uang asing, peristiwa setelah periode pelaporan, dan pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
2. Kendala yang ditemui dalam kegiatan pencatatan di CV Media Grafika biasanya bersumber dari kepala cabang di daerah yang tidak paham bagaimana itu akuntansi. Keadaan itu seringkali menimbulkan kesalahan-kesalahan yang harus ditelusuri lebih teliti oleh saudara Abdul Gafur.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi UMKM CV Media Grafika

- a. CV Media Grafika telah memiliki sepaket laporan keuangan yang baik. Hanya saja, jika memungkinkan, membuat Catatan Atas Laporan Keuangan bisa membuat laporan keuangan perusahaan terlihat semakin sempurna. Keberadaan catatan atas laporan keuangan sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan seperti para karyawan yang tidak memiliki dasar akuntansi untuk ikut mengetahui dan memahami kondisi perusahaan tempat mereka bekerja.
- b. Untuk ukuran UMKM dengan beberapa cabang seperti CV Media Grafika ini, alangkah baiknya jika perusahaan mulai mempekerjakan karyawan untuk bidang pengendalian internal. Dengan begitu, fungsi kontrol dan pengawasan dari sebuah perusahaan akan lebih dapat diperhatikan dengan baik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karena keterbatasan waktu dan kekurangan data, maka saya harapkan untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang lebih valid dari berbagai instansi yang terkait.

3. Bagi Instansi Terkait

Berdasarkan pemaparan di latar belakang, sesungguhnya masih banyak UMKM yang belum menerapkan SAK ETAP. Untuk itu saya harap pihak-pihak terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM serta Ikatan Akuntan Indonesia untuk lebih giat lagi mensosialisasikan dan memberikan pelatihan khusus tentang SAK ETAP ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astalia, Ade. Dkk. 2014. *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Penyajian laporan Keuangan PT Nichdo Manado Suisan*. Jurnal EMBA : 2 (3)
- Baridwan, Zaki. 2014. *Intermediate Accounting*. Edisi ke-8. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi-UGM
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Darmayanti, Ni Putu Octavia Anggraini, Ni Nyoman Trisna Herawati & I Gusti Ayu Purnamawati. 2017. *Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP Dan Penilaian Kinerja Pada UMKM Pengrajin Endek Mastuli "Ayu Lestari" Di Desa Kalianget Kecamatan Buleleng*. Ejournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 1.
- Fadlol, M Ainul. Titin Kartini. Sri Kantun. 2018. *Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Oryza Mart*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. 12 (2)
- Farida, Ika U. 2016. *Akuntansi Untuk UKM*. Surakarta: CV Kekata Grup.
- Frisilia, Friska. I Gde Ari Wirajaya. 2018. *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada PT. Aira Nusantara Indah*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 23(1):4-5
- Hantono. Rahmi, Namira Ufrida. 2018. *Pengantar Akuntansi*. Jogjakarta : DeePulish
- Hetika. Mahmudah, Nurul. 2017. *Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan SAK ETAP Pada UMKM Kota Tegal*. Politeknik Harapan Bersama : Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis. 5(2)
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta.

- Kristanto, Eri. 2011. *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada UMKM Pengrajin Rotan Di Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi : Universitas Sebelas Maret
- Kristiyanti, Mariana. 2012. *Peran Strategis UKM Dalam Pembangunan Nasional*. *Majalah Ilmiah Informatika*. 3(1)
- Nurdwijayanti, Novia. Sulistianingsih. 2018. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM*. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*. 4(1).
- Pradipta, I Gusti Putu Ngurah Aditya, & Ni Luh Supadmi. 2015. *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Kegunaan Pada Implementasi SAK ETAP (Studi Empiris Pada UKM Di Denpasar Utara)*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13, 857–887
- Qoni'ah, Iffah. 2018. *Analisis Praktik Pencatatan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM*. Skripsi : IAIN Surakarta.
- Rahmawati, T. Puspitasari, O.R 2017. *Implementasi SAK ETAP dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM Terkait Akses Modal Perbankan*. *Jurnal Kajian Akuntansi*. 1(1)
- Rahmawati, T. Puspitasari, O.R . 2016. *Mengungkap Kesiapan Implementasi SAK ETAP dalam Menyajikan Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Kuningan*. *Prosiding SnaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*. 6(1)
- Rosmiati. Dkk. 2018. *Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan Umkm (Studi Kasus Pada Rumah Makan Apin Dan Smile Cell)*. *Universitas Bandar Lampung : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. 9(2)
- Salmiah, Neneng., Indarti, & Inova Fitri Siregar. 2015. *Analisis Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Pada UMKM Di Kecamatan Sukajadi Binaan Diskop & Umkm Kota Pekanbaru)*. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, April 2015 : 212 – 226

Sariningtyas, Pratiwi. Diah Tituk W. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Usaha Kecil Dan Menengah. Jurnal Akuntansi Universitas Indonesia*. 1(1)

Sejwali, Irma. 2017. *Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada US Pahira Di Kabupaten Pinrang*. Tugan Akhir : Politeknik Negeri Ujung Pandang.

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian manajemen*. Cet. ke-dua. Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tiswiyanti, Wiwik. Desriyanto. Fitriani Mansur. 2017. *Kualitas Laporan Keuangan dan Implementasi SAK ETAP pada UMKM di Kota Jambi*. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 7(2)

Tuti, Rias., Dan Patricia Febrina Dwijayanti. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Umkm dalam Menyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Sak Etap*. Surabaya : Universitas Katolik Widya Mandala

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenamedia Grup

<https://azharnasri.blogspot.com/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html>

diakses pada tanggal 11 November 2019

<https://dconsultingbusinessconsultant.com/3074/html> diakses pada tanggal

02/12/2019

<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/halpernyataan-3.html#>

diakses pada 02/12/2019

<http://layarasdos.blogspot.com/2014/05/perbedaan-sak-etap-dengan-psak.html#>

diakses pada 02/12/2019

LAMPIRAN